

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Republika

Wilayah: BPK Jawa Tengah

BPK Perwakilan Jateng Serahkan LHP atas LKPD Secara Daring

<https://republika.co.id/berita/q9fzhl399/bpk-perwakilan-jateng-serahkan-lhp-atas-lkpd-secara-daring>



Semua pekerjaan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan pemeriksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kendati masih dalam imbauan kerja dari rumah (WFH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pemeriksaan. Senin (27/4), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora.

Penyerahan LHP untuk kedua daerah yang dilaksanakan dalam suasana Ramadhan dan WFH, dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fitur ruang konferensi zoom pro. Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, sejalan dengan imbauan pemerintah mengenai pelambatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), BPK memberlakukan sistem *Work From Home* (WFH) sejak 17 Maret 2020.

Setelah WFH diberlakukan, maka semua pekerjaan dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan pemeriksaan. "Beberapa tim pemeriksa yang sudah melaksanakan pemeriksaan di lapangan sebelum 17 Maret 2020, ditarik kembali untuk melaksanakan pemeriksaan dari rumah (desk audit)," jelasnya.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta menggunakan bantuan auditor Inspektorat Daerah. Permintaan keterangan/ wawancara dengan entitas, permintaan dokumen/data, koordinasi tim dan review konsep LHP dengan melalui e-mail, Whatsapp, dan online meeting.

Namun demikian, BPK Jawa Tengah tetap melakukan upaya menjaga kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan Quality Control dan Quality Assurance dari pengendali teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan.

"Hingga hari ini, penyerahan LHP LKPD dilakukan secara simbolis dengan menunjukkan dokumen LHP melalui share screen zoom," tambahnya.

Penyerahan LHP secara online hari ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ayub Amali dan diikuti para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng, serta ketua tim pemeriksa LKPD Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora.

LHP diterima oleh Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Ketua DPRD Blora HM Darsum, dan Bupati Blora Djoko Nugroho diikuti oleh pejabat struktural lainnya.

Masih menurut Ayub Amali, output dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Yakni meliputi kriteria Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan pemeriksaan LKPD TA 2019 yang telah dilakukan, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Blora berhasil mempertahankan Opini WTP. Dalam hal pemeriksaan atas LKPD, BPK melaporkan hasil pemeriksaannya dalam tiga buah buku.

Masing- masing Buku I memuat LKPD dan opini BPK atas LKPD, Buku II memuat temuan- temuan terkait SPI, dan Buku III memuat temuan-temuan pemeriksaan terkait Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Karanganyar dan Blora, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

Permasalahan tersebut antara lain meliputi, pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2019 belum optimal, pengelolaan penerimaan perizinan reklame di Kabupaten Karanganyar belum optimal, kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan di Kabupaten Karanganyar, dan denda keterlambatan pada lima paket pekerjaan.

Selain itu juga terkait dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah, seperti Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Blora belum dipertanggungjawabkan dan terlambat dipertanggungjawabkan, Pajak BOS di Kabupaten Blora belum disetor tepat waktu, serta terdapat sisa kas sekolah regrouping belum disetor ke kas daerah provinsi.

Ayub Amali menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pimpinan daerah, DPRD, beserta jajarannya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan laporan keuangan dan atas dukungannya terhadap pelaksanaan pemeriksaan sehingga penyerahan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Karanganyar dan Blora dapat terlaksana.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH